



Wisata Halal Terbentur Anggaran

JOGJA—Pelaku wisata di DIY sudah siap menerapkan wisata halal. Sayangnya, penerapan wisata halal terbentur anggaran.

Abdul Hamid Razak, Muhammad Nadhir Attamimi & Hafit Yudi Suprobo
redaksi@harianjogja.com

► Kendala yang muncul untuk memperoleh sertifikasi halal atau syariah diperlukan biaya tidak sedikit.

► Kepala Dinas Pariwisata Sleman Sudarningsih mengatakan lembaganya sudah mensosialisasikan terkait dengan wisata halal kepada pelaku wisata.

Instansi	Nilai B
1.	<input type="checkbox"/> Negara
2.	<input type="checkbox"/> Posi
3.	<input type="checkbox"/> Netra
4.	
5.	

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan wisata halal adalah dengan sertifikasi serta pelabelan. Untuk memperoleh itu, selain dibutuhkan waktu yang lama juga biaya yang tidak sedikit.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman, Nyoman Rai Savitri mengatakan mayoritas warga Sleman beragama Islam, sehingga mendukung untuk ketersediaan tempat ibadah yang representatif, baik di tempat wisata maupun tidak.

"Ketersediaan makanan yang halal logikanya juga sangat banyak dan memudahkan wisatawan baik jumlah dan sebarannya," katanya, Senin (4/11).

Namun, kendala yang muncul untuk memperoleh sertifikasi halal atau syariah diperlukan biaya tidak sedikit. Baik biaya dalam pengurusan sertifikasinya, juga untuk membenahi atau melengkapi peralatan di tempat usaha.

"Sertifikasi halal atau syariah juga memiliki batas waktu yang berarti pada periode waktu tertentu harus diperbaharui lagi juga dengan biaya," katanya.

Belum lagi, kata Nyoman, untuk usaha atau industri pariwisata, sertifikasi halal atau syariah belum berkorelasi positif dengan peningkatan profit. Sehingga kurang diminati oleh pengusaha. "Padahal ketersediaan tempat ibadah yang representatif dan makanan halal cukup baik," katanya.

Sikap senada disampaikan Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Rose Sutikno. Dia mengatakan tahun ini tidak ada anggaran untuk sertifikasi halal.

"Wisata halal memang masih menjadi program kami, cuma belum jadi prioritas. Makanya rencana sertifikasi unit usaha wisata halal tahun ini tidak bisa kami lakukan," katanya.

Alasan lainnya, DIY masih menjunjung nilai-nilai toleransi yang tinggi sehingga tidak ingin terjebak dalam permasalahan destinasi wisata halal dan tidak halal. Sebagai gantinya, Rose menyebutkan, jika konsep wisata halal yang diambil dan diterapkan di DIY untuk saat ini adalah *moslem family*. Kondisi tersebut berbeda dengan yang sudah diterapkan di Aceh maupun NTB.

Sebagai gantinya, lanjut Rose, konsep wisata halal yang diterapkan saat ini berbentuk kawasan, *moslem family*. Kawasan-kawasan wisata ini semisal di Mlangi (Sleman), Krapyak (Bantul), dan Kotagede (Jogja). "Itu jelas. Kalau di Malioboro tidak mungkin, karena di Jogja budayanya plural. Hanya kawasan tertentu," katanya.

► Halaman 6

Wisata Halal...

Saat ini, lanjutnya, hanya ada sejumlah usaha pariwisata seperti hotel, restoran, kuliner dan beberapa usaha lainnya yang menawarkan wisata halal. Jumlahnya masih sedikit, hanya sekitar tujuh bidang usaha. Ketujuh unit usaha ini menerapkan konsep syariah seperti membedakan toilet antara laki-laki dan perempuan, memiliki musala, dan tempat wudu laki-laki dan perempuan berbeda.

"Konsep seperti itu sebenarnya sudah bisa disebut halal. Saat menginap di hotel, kalau bukan pasangannya tidak boleh. Panti pijat halal. Itu bisa dilakukan. Misalnya, yang pijat perempuan yang melayani perempuan. Begitu juga yang laki-laki," katanya.

Menurutnya, tidak terlalu sulit menyediakan wisata halal. Bahkan sudah banyak yang menerapkan. Hanya saja, belum ada label halal. "Padahal wisatawan asal Timur Tengah membutuhkan label halal itu. Nah bagaimana menciptakan wisata halal ini sesegera mungkin untuk menangkap peluang," katanya.

Sosialisasi

Kepala Dispar Sleman Sudarningsih mengatakan lembaganya sudah mensosialisasikan terkait dengan wisata halal kepada pelaku atraksi wisata. "Kami [Dispar Sleman] sejak 2018 sudah gencar mensosialisasikan penerapan wisata halal di Sleman. Tahap awal yang menjadi sasaran yaitu restoran, hotel, dan desa wisata," ujar Sudarningsih.

Kendati demikian, untuk mengaplikasikan wisata halal prosesnya sangat panjang. Misalnya, untuk makanan harus ada izin Produksi Industri Rumah Tangga pangan (PIRT), BPOM baru dilanjutkan sertifikasi halal.

Realisasi wisata halal sebenarnya sudah dilakukan di desa wisata. "Kalau untuk desa wisata kemarin sudah mulai kerja sama dengan KKN UIN di Desa Pulesari, Kecamatan Turi, Sleman untuk Hotel Cakra Kusuma, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, restonya sudah bersertifikasi halal," jelasnya.

Penerapan wisata halal di desa wisata juga menggandeng Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Dinas Pariwisata terus berupaya agar semua desa wisata bisa menjadi desa wisata dengan konsep wisata halal.

Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata Gunungkidul, Supartono menuturkan konsep wisata halal yang ditawarkan Kementerian Pariwisata sudah ada sejak lama, tetapi Kabupaten Gunungkidul belum bisa menerapkan

Konsep tersebut, kata dia, salah satunya terapat pemisahan tempat berwisata antara wanita dan pria, baik sarana prasarana hingga lokasi. "Kami masih sulit untuk memisahkan antara wisatawan laki-laki dan perempuan, karena sarana prasarana kami belum menjangkau dan memadai," kata Supartono.

Ia menjelaskan selama ini wisata di Gunungkidul campur antara laki-laki dan perempuan. Pihaknya akan terus mengkaji lokasi mana dan seperti apa nantinya wacana Kemenpar jika diterapkan di Gunungkidul.

Selain itu, tawaran Kemenpar juga menasar pada penyediaan makanan halal dalam artian makanan yang disajikan di tempat-tempat wisata bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim. "Itu semua [konsep Kemenpar] masih akan terus kami kaji lagi, kira-kira dimana sih yang cocok untuk kami terapkan seperti itu," ujarnya.

Ia mengungkapkan walaupun wisata halal belum bisa diterapkan di Bumi Handayani ini, tetapi fasilitas-fasilitas standar wisata halal sudah lama diterapkan di spot-spot lokasi wisata. Mulai sarana prasarana seperti masjid, musala, MCK dan lainnya. "Terutama di lokasi-lokasi yang ramai kunjungannya apalagi penyediaan perbadatan muslim," ujarnya.

Selanjutnya, dengan fasilitas yang sudah mumpuni dan representatif wisata halal, kata dia, wisatawan mancanegara yang berasal negara-negara muslim tak perlu risau untuk berwisata dan menikmati alam wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul. "Kami memang saat ini masih dalam pembinaan kepada para pelaku wisata untuk menjual produk-produk halal."

Wisatawan Nyaman

Kondisi yang sama terjadi di Bantul. Dinas Pariwisata Bantul saat ini masih terus berdiskusi dengan Dinas Pariwisata DIY dan sejumlah pelaku wisata untuk menyamakan konsep wisata halal agar pelaku wisata di sejumlah objek wisata tidak salah memahami.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan pertama menggarap wisata halal untuk menggaet wisatawan muslim, salah satunya dengan menyediakan fasilitas kebutuhan wisatawan agar nyaman. Wisata halal, baginya bukan berarti wisata syariah tetapi lebih pada pelayanan yang merata untuk semua wisatawan, termasuk wisatawan muslim.

"Misalnya kalau butuh makanan, makanan itu perlu ada penjelasan bahwa makanan itu aman dan halal

bisa menyediakan sajadah dan arah kiblat," kata Kwintarto.

Kepala Dinas Pariwisata Kuloprogo, Niken Probo Laras mengaku tengah mengidentifikasi lokasi mana saja yang cocok dijadikan tempat wisata halal, mengingat kunjungan wisata dari negara muslim akan terdorong lewat Yogyakarta International Airport (YIA). "Kami sedang petakan Desa Wisata Banjararum, Purwoharjo, Sidoharjo, dan Sidorejo, empat itu mungkin ke depannya bisa dijadikan tempat wisata halal," ujarnya.

Adapun Desa Wisata Banjararum berada di Kecamatan Kalibawang, Desa Wisata Purwoharjo dan Sidoharjo berada di Kecamatan Samigaluh; serta Desa Wisata Sidorejo berlokasi di Kecamatan Lendah.

Meski begitu, ia masih belum bisa memastikan kapan Kuloprogo akan bisa mengklaim memiliki wisata halal yang baik, karena masih membutuhkan banyak aspek, seperti dukungan fasilitas, sistem pengelolaan, serta perihal sumber daya manusia.

"Wisata halal itu enggak cuma ada masjid dan musala, tapi sarana pendukungnya juga. Misalnya tempat wudu, pemisahan jemaah ketika salat, akses, bahkan makanannya harus halal," ujar Niken.

Proses merintis empat desa wisata ini supaya memiliki kategori halal masih membutuhkan dukungan pemerintah provinsi. "Semoga ke depan ada support dari provinsi ke arah sana," ucapnya.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengungkapkan wisata halal ini mempunyai pangsa pasar khusus yang cukup berkembang di beberapa negara termasuk negara yang penduduknya banyak nonmuslim. "Oleh karena itu PHRI sangat mendukung hal itu, kita untuk anggota PHRI baik hotel maupun restoran sudah ada beberapa yang mempunyai sertifikasi halal baik akomodasi maupun makanannya," kata dia.

Namun, kata dia, hal ini tidak hanya terkait PHRI saja. Harus ada dukungan asosiasi pariwisata lainnya baik pramuwisata maupun travel agen dalam menangkap peluang tersebut. Menurutnya, mereka juga perlu kesiapan dalam melayani tamu-tamu *halal tourism* dan juga membuat paket-paket wisata halal tersebut. "Untuk kami [PHRI] akan lebih mengoptimalkan teman-teman anggota PHRI untuk bisa memiliki sertifikasi halal baik hotel maupun restorannya. Serta pelatihan-pelatihan sumber daya manusia yang berbasis halal," kata dia.

(Kusnadi Irfi Qomah, Ujung Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005